

EFEKTIVITAS DAN EFISIEN KINERJA ORGANISASI PUBLIK DI DISTRIK KEPULAUAN AYAU

Deni Mambtisauw¹, Hermanto Suaib², Arie Purnomo³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Sorong

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Distrik Kepulauan Ayau Kabupaten Raja Ampat dan faktor-faktor yang memengaruhi kinerja Dinas Pengelolaan Pemerintahan Kabupaten Raja Ampat. Penelitian ini menggabungkan antara kualitatif dan kuantitatif. Data penelitian dikumpulkan melalui observasi dan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Distri Ayau, kabupaten Raja Ampat. Sampel dalam penelitian ini meliputi Bapeda, Dinas Pendapatan Daerah, Distrik Kepulauan Ayau Kabupaten Raja Ampat, dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Raja Ampat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator kinerja Distrik Kepulauan Ayau didasarkan pada Akuntabilitas dan Resposibilitas. Akuntabilitas di Distrik Kepulauan Ayau sudah baik. Namun pada indikator responsibilitas, Distri Kepulauan Ayau belum maksimal. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi kinerja organisasi Distrik Kepulauan Ayau antara lain, struktur organisasi, sumberdaya manusia, dan finansial. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Kinerja Distrik Kepulauan Ayau belum sepenuhnya berjalan optimal sehingga pemerintah setempat perlu lebih meningkatkan kinerja para pegawainya atau dengan kata lain bahwa inerja Distrik Kepulauan Ayau Kabupaten Raja Ampat belum berjalan efektif dan efisien sebagaimana mestinya.

Kata Kunci: Efektifitas, efisien, Kinerja Organisasi, Ayau.

PENDAHULUAN

Pengukuran kinerja terhadap suatu organisasi publik merupakan suatu isu pada beberapa tahun terakhir ini, terutama setelah banyaknya keluhan dari para pengguna jasa yang menyatakan bahwa kinerja organisasi publik adalah sumber kelambanan, pungli dan in-efisiensi (Dwiyanto,1995). Lebih lanjut Dwiyanto menjelaskan bahwa citra organisasi publik di negara berkembang, termasuk Indonesia dalam melayani kepentingan masyarakat pada umumnya amat buruk jika dibandingkan dengan organisasi swasta. Karenanya tidaklah mengherankan kalau organisasi swasta seringkali dijadikan sebagai alternatif pilihan kebijakan untuk menyelesaikan berbagai persoalan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Berbicara masalah kinerja organisasi publik, terlebih setelah diberlakukannya UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan UU Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada hakekatnya

penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas daerah secara aktif, meningkatkan peran dan fungsi DPRD.

Format kebijakan otonomi daerah yang ada pada saat ini menandai awal dari suatu perubahan fundamental dalam paradigma penyelenggaraan pemerintahan di negeri ini. Kalau pada pemerintahan orde baru, pembangunan menjadi misi terpenting pemerintah (*developmentalism*) dan pemerintah yang pada masa itu menjadikan dirinya sebagai pusat kendali proses pembangunan itu (sentralisasi di tingkat nasional), kini harus mereposisi diri sebagai pelayan dan pemberdaya masyarakat dan harus menyebarkan aktivitasnya ke berbagai pusat (*plusentris*) di tingkat lokal. Dengan kata lain arus baru kehidupan politik kita sekarang adalah realitas pergeseran kekuasaan dari pusat (*sentral*) menuju lokus-lokus daerah (*desentral*) dan berbasis pada kekuatan masyarakat sendiri (*society*) (Lembaga Informasi Nasional, 2002).

Sejak diberlakukannya Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang nomor 33 Tahun 2004, Bangsa Indonesia telah memulai proses perubahan mendasar dalam kehidupan ketatanegaraan yang akan mempengaruhi segala dimensi kehidupan bangsa, baik dimensi politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Apalagi setelah keluarnya PP nomor 84 tahun 2000 tentang pedoman organisasi perangkat daerah, maka pemerintah daerah di masing-masing wilayah membentuk berbagai macam organisasi perangkat daerah untuk melaksanakan otonomi dalam rangka kemajuan dan kesejahteraan rakyat, dunia usaha dan daerah itu sendiri.

Sebagai tindak lanjut dari adanya kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat mengeluarkan kebijakan berupa Perda Kabupaten Raja Ampat Nomor 22 Tahun 2000 tentang pembentukan dan susunan organisasi dinas daerah Kabupaten Raja Ampat. Distrik Kepulauan Ayau sebagai unsur pelaksana pemerintah kabupaten mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang pengelolaan Pemerintahan dan tugas pemantauan yang diberikan kepada pemerintah daerah.

Distrik Kepulauan Ayau mempunyai tugas yang berat dalam mengelola Pemerintahan, sebab pengelolaan Pemerintahan merupakan isu yang mencakup segala aspek kehidupan yang sangat luas dalam kaitannya dengan kegiatan pembangunan. Semua aspek kegiatan pembangunan tidak lepas dari keterkaitan dengan Pemerintahan. Oleh karena itu pengelolaan lingkungan merupakan hal yang mutlak diperlukan agar kegiatan pembangunan tidak menimbulkan dampak negatif yang serius terhadap lingkungan.

Untuk melaksanakan visi dan misi Distrik Kepulauan Ayau Kabupaten Raja Ampat, diperlukan sumber daya baik berupa sumber daya manusia, sarana dan prasarana maupun pembiayaan. Aspek sumber daya yang tersedia dalam organisasi merupakan salah satu aspek yang dapat menentukan keberhasilan organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (Notoatmodjo,1992).

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Menurut Sugiono (2001) Jenis penelitian dapat dikelompokkan menurut tujuan, pendekatan, tingkat ekplanasi dan jenis data. Sesuai dengan fokus penelitian yaitu kinerja Distrik Kepulauan Ayau Kabupaten Raja Ampat, maka penelitian ini lebih memungkinkan apabila tingkat ekplanasi menggunakan penelitian deskriptif, dengan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Stuart A Schlegel (dalam Sugiyono, 1989) mengatakan bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk mendapatkan dan menyampaikan fakta-fakta dengan jelas dan teliti. Studi deskriptif harus lengkap, tanpa banyak detail yang tidak penting dengan menunjukkan apa yang penting atau tidak.

Pada penelitian ini, peneliti hanya mengembangkan konsep dan menghimpun fakta tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis (Singarimbun,1989). Oleh sebab itu penelitian ini terbatas pada usaha mengungkapkan suatu keadaan atau peristiwa atau keadaan subyek / obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (*fact finding*).

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari stakeholders yang terkait, sedangkan untuk data sekunder diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

Untuk jenis penelitian kuantitatif, penulis menggunakan data sekunder sedangkan untuk Jenis penelitian kualitatif, pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan observasi langsung dan dokumentasi. Dokumen adalah setiap bahan yang tertulis atau film yang dipersiapkan untuk penelitian, pengujian suatu peristiwa atau record maupun yang tidak dipersiapkan untuk itu (Moleong,1999). Data-data sekunder ini diperoleh dari berbagai sumber

yang terkait antara lain dari Kantor Bappeda, Dinas Pendapatan Daerah, Distrik Kepulauan Ayau Kabupaten Raja Ampat, dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Raja Ampat. Disamping dokumentasi yang terdapat pada kantor-kantor tersebut juga dilakukan pengambilan data dokumen dari perpustakaan.

Wawancara dilakukan terhadap informan yang telah ditentukan untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dan mendalam tentang berbagai hal yang diperlukan, yang berhubungan dengan masalah penelitian, juga untuk merespon berbagai pendapat untuk meningkatkan kinerja organisasi yang akan datang. Wawancara dilakukan terhadap “*stakeholder*” yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan hidup termasuk masalah pertambangan yang dipilih secara “*purposive*”, yaitu metode penarikan sampel dengan tujuan tertentu, sesuai dengan data yang dibutuhkan. Dengan cara ini dapat diperoleh masukan-masukan untuk memperdalam kajian mengenai hambatan dan masalah serta preferensi kinerja Distrik Kepulauan Ayau Kabupaten Raja Ampat.

Dalam wawancara terhadap informan tersebut menggunakan panduan wawancara, sebagai alat dalam melakukan wawancara agar dapat lebih terfokus dan konsistensi hasil pendataan. Wawancara dilakukan kepada Bupati, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Kepala Distrik Kepulauan Ayau Kabupaten Raja Ampat beserta Kepala Bagian Tata Usaha, Para Kepala Sub Dinas, para Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi.

Selain itu wawancara juga dilakukan kepada para pengusaha / penambang, dengan penentuan informan dilakukan secara *purposive*. Pemilihan informan untuk pengusaha / penambang disesuaikan dengan konteks data di lapangan. Observasi dilaksanakan dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian, dengan maksud memperoleh gambaran empirik pada hasil temuan. Hasil dari observasi ini dapat mempermudah dalam menjelaskan keterkaitan dari fenomena-fenomena yang ada. Observasi telah dilakukan antara lain pada daerah pengelolaan lingkungan hidup dan penambangan di Kabupaten Raja Ampat.

Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan dan ditunjang dengan berbagai argumentasi tinjauan pustaka, diolah serta dianalisis dengan menggunakan teknik kualitatif, dilengkapi dengan analisis data sekunder (kuantitatif). Pendekatan data sekunder dimaksudkan agar supaya analisis data kualitatif menjadi lebih komprehensif.

Pertimbangan digunakannya teknik kualitatif dan kuantitatif, adalah mampu menggali informasi yang lebih luas, mendetil dan mendalam dari fenomena yang terjadi, juga dapat mengkaji temuan-temuan dari kasus yang terjadi di lokasi penelitian, sehingga kajian yang diperoleh diharapkan dapat mengembangkan konsep.

Adapun proses analisis data meliputi penilaian data. Data yang telah dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, wawancara dan observasi, dilakukan penilaian dengan memperhatikan prinsip validitas, obyektivitas, reliabilitas melalui cara mengkategorikan data dengan sistem pencatatan yang relevan dan melakukan kritik atas data yang telah dikumpulkan. Interpretasi data, yang dilakukan dengan cara menganalisis data dengan pemahaman intelektual yang dibangun atas dasar pengalaman empiris terhadap data, fakta, dan informasi yang telah dikumpulkan dan disederhanakan dalam bentuk analisis tabel. Penyimpulan terhadap hasil interpretasi data. Dengan demikian hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan dapat menjawab berbagai masalah menyangkut pertanyaan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan permasalahan di dalam penelitian, maka isi Bab IV akan dikelompokan dalam Tiga sub-bab. Ketiga sub-bab ini diharapkan dapat menjawab permasalahan tersebut. Sub-bab *pertama* berisi kinerja organisasi Distrik Kepulauan Ayau, yang dalam konteks penelitian ini dilihat dari indikator akuntabilitas, responsibilitas, dan responsivitas. Kemudian dilanjutkan dengan sub-bab *kedua* berisi pembahasan beberapa variabel yang mempengaruhi kinerja organisasi Distrik Kepulauan Ayau. Adapun variabel-variabel pengaruh yang menjadi fokus penelitian ini adalah variabel struktur organisasi, variabel sumber daya manusia, dan variabel finansial. Sub-bab *ketiga*, berisi keterkaitan antara variabel struktur organisasi, sumber daya manusia dan finansial dengan kinerja organisasi Distrik Kepulauan Ayau.

Kinerja Organisasi Distrik Kepulauan Ayau

Untuk mengetahui tentang kinerja organisasi Distrik Kepulauan Ayau, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan dalam pengelolaan termasuk pertambahan sesuai dengan misi dan tujuan organisasi, maka dalam pembahasan ini akan mencoba menganalisis pencapaian kinerja Bagian yang dilihat dari indikator dalam kaitannya dengan akuntabilitas ini akan dilihat dari tingkat konsistensi antara kebijakan dan kegiatan Distrik Kepulauan Ayau dengan aspirasi masyarakat, khususnya dalam pengelolaan lingkungan

dan pertambangan, tingkat kemampuan meningkatkan prakarsa dan kepedulian aparatur dan masyarakat terhadap SDA dan Lingkungan, tingkat upaya rehabilitasi kerusakan sumber daya alam dan lingkungan.

Akuntabilitas organisasi Distrik Kepulauan Ayau, dapat dilihat *pelaksanaan misi yang pertama* yaitu menerapkan berbagai kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kewenangan dalam pengelolaan termasuk pertambangan yang telah diberikan kepada Distrik, telah dilaksanakan dengan menerapkan berbagai kebijakan antara lain: kebijakan eksternal berupa perundang-undangan tentang pengelolaan baik berupa kebijakan pusat maupun daerah (Propinsi), sedangkan kebijakan internal yaitu berupa kebijakan yang sarasannya melalui Distrik itu sendiri antara lain: peraturan daerah dan Keputusan Bupati yang berhubungan dengan kebijakan tentang pengelolaan termasuk pertambangan.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Distrik Kepulauan Ayau merupakan penjabaran dari Perda Nomor 3 tahun 2011 tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011-2012, diantaranya kebijakan untuk mewujudkan dan memulihkan lingkungan hidup, agar tetap terjaga keseimbangan kehidupan, kebijakan meningkatkan pengawasan dan pengendalian penanganan lahan pasca tambang (reklamasi), kebijakan mengendalikan perkembangan kegiatan pertambangan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kebijakan memberdayakan / memfungsikan lahan-lahan bekas penambangan untuk menghindari kerusakan lahan banjir dan erosi serta kebijakan mempertahankan luas dan batas-batas kawasan yang telah ditentukan agar tidak diperbolehkan untuk dikonservasi atau dialihfungsikan pada jenis kegiatan lain. Dibentuknya Distrik Kepulauan Ayau sebagaimana pernyataan Bupati bahwa:

“dalam melaksanakan otonomi daerah, kami sedang melaksanakan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah sebagaimana telah tertuang di dalam Propeda Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011-2012 dengan tujuan untuk menyempurnakan sistem kelembagaan aparatur pemerintah daerah, manajemen pemerintahan umum dan pembangunan agar efisien dan efektif di lingkungan pemerintah daerah yang meliputi kegiatan penataan kembali struktur organisasi, mekanisme kerja, dan peraturan perundang-undangan yang memadai guna menjamin efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai adalah terciptanya kesesuaian antara tugas dan fungsi, struktur organisasi dan kualifikasi maupun jumlah pegawai, serta terbangunnya hubungan kerja antar organisasi pemerintah dan organisasi masyarakat. Dan untuk melaksanakan tugas pengelolaan termasuk

pertambangan dalam mewujudkan misi meningkatkan pemerataan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan, maka salah satunya dibentuk Distrik Kepulauan Ayau sebagai pengembangan dari Bagian Sekretariat Daerah”.

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa maksud dirubahnya Bagian Sekretariat Daerah menjadi Distrik Kepulauan Ayau adalah untuk melaksanakan tugas pengelolaan termasuk pertambangan. Dalam menerapkan berbagai kebijakan baik yang tertuang dalam Perda Kabupaten Raja Ampat maupun dalam Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor 17 Tahun 2011 serta Surat Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor 820/Kep.168-DPLH/2011, masih ada tugas yang harus ditangani oleh Distrik Kepulauan Ayau tetapi belum tertuang secara formal dalam kebijakan tersebut. Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Distrik bahwa:

“Kegiatan yang dilaksanakan oleh Distrik Pengelolaan Kabupaten Raja Ampat belum semuanya mencerminkan aspirasi masyarakat, karena dalam kebijakannya belum mempunyai perangkat hukum sendiri sebagai payung dalam menjalankan kebijakan, dan saat ini kegiatan yang dilaksanakan masih mengacu pada kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Jawa Barat. Hal tersebut disebabkan dalam pemberian nama Distrik Kepulauan Ayau belum bisa menampung semua kebijakan dan kegiatan organisasi yang ada dan terkesan seolah-olah hanya menangani kegiatan saja, sementara kegiatan yang lain yang harus ditangani seperti pertambangan dan energi belum terkaper, sehingga masih ada masyarakat yang mengurus Surat Izin pertambangan yang datang ke Propinsi, karena masyarakat mengira di Kabupaten belum ada Distrik yang menangani pertambangan”.

Pernyataan yang dikemukakan Kepala Distrik tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan dan kegiatan Distrik belum sepenuhnya sesuai dengan aspirasi masyarakat. Hal tersebut disadari bahwa sebagai Distrik yang baru dibentuk, maka dalam pelaksanaannya masih dalam tarap pembuatan perangkat hukum sebagai payung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Hal tersebut juga diakui oleh Sekretaris DPRD:

“Bahwa Distrik-Distrik yang baru dibentuk umumnya belum mempunyai perangkat hukum sebagai aspek legal formal dalam menjalankan tugas dan fungsinya karena sebagaimana Distrik yang baru maka kami berprinsip sambil jalan maka perangkat hukum kami benahi dengan harapan semua kegiatan Distrik dapat menampung aspirasi masyarakat. Begitupula dengan Distrik Kepulauan Ayau, belum semua kebijakan dan kegiatan yang menyangkut masyarakat

yang harus dilayani seperti lingkungan hidup, pertambangan dan energi tertuang semuanya dalam perda. sementara ini kegiatan Distrik hanya berlandaskan pada Perda pembentukan dan Keputusan Bupati tentang SOTK saja. Tetapi mudah-mudahan dalam waktu dekat semua perangkat hukum dapat kami tuntaskan termasuk perda tentang lingkungan hidup, pertambangan dan energi.

Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa perangkat hukum merupakan acuan atau landasan yang sangat diperlukan oleh suatu organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Tetapi berdasarkan hasil pengamatan dan data yang ada di Distrik Kepulauan Ayau ternyata dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya baru berlandaskan pada Perda Kabupaten Raja Ampat Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan Distrik Daerah, Lembaga dan Badan di Kabupaten Raja Ampat, Keputusan Bupati Nomor 17 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata kerja Distrik Kepulauan Ayau dan Surat Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor 820/Kep.168-DPLH/2011 tentang Pelimpahan sebagian wewenang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan termasuk pertambangan dalam hal penandatanganan surat izin/rekomendasi kepada Kepala Distrik Kepulauan Ayau.

Adapun wewenang yang dilimpahkan diantaranya penandatanganan surat ijin/rekomendasi tentang surat ijin usaha pertambangan (SIUP), surat ijin pengeboran (SIP), Surat ijin pengambilan air (SIPA) bawah tanah, Surat ijin pengelolaan limbah (SIPL), Surat ijin usaha perusahaan pengeboran air bawah tanah (SIUP ABT), Surat ijin juru bor (SIJB) dan surat ijin eksplorasi(SIE).

Sementara itu dalam upaya meningkatkan prakarsa dan kepedulian aparatur dan masyarakat terhadap SDA dan lingkungan, Distrik Kepulauan Ayau berusaha membuat program pengembangan SDM melalui pembinaan aparatur dan masyarakat dengan kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya mengadakan penyuluhan pengelolaan SDA dan kepada aparatur dan masyarakat dengan jumlah peserta 50 orang, mensosialisasikan penerapan AMDAL,UKL,UPL bagi kegiatan usaha kepada 30 perusahaan yang ada di Kabupaten Raja Ampat, dan memberikan pelatihan tentang pengelolaan kepada 50 orang warga masyarakat.

Berdasarkan pengamatan, kegiatan yang dilaksanakan Distrik tersebut baru sampai pada tahap pencapaian target peserta dan penyampaian materi, sedangkan hasil (outcome) dari kegiatan tersebut belum terealisasi. Sebagaimana pernyataan salah seorang peserta penyuluhan SDA dan lingkungan, menyatakan bahwa:

“pada waktu penyuluhan kami diberi materi tentang penegakan hukum lingkungan, penerapan studi AMDAL, UKL dan UPL, dan penataan pemukiman yang berwawasan lingkungan. Setelah itu belum kami terapkan, karena masih bingung sebab menurut hemat kami yang perlu diberi penyuluhan adalah mereka yang melanggar peraturan, seperti perusahaan yang tidak membuat dokumen AMDAL, UKL dan UPL, para penambang liar sehingga jelas sasarannya”.

Kebijakan dan kegiatan tersebut agar aparaturnya dan masyarakat mempunyai kepedulian untuk mengelola SDA dan lingkungan hidupnya. Hal tersebut diperjelas dengan hasil wawancara dengan Kepala Distrik:

“ kami menyadari bahwa saat ini tingkat kepedulian aparaturnya dan masyarakat terhadap SDA dan lingkungan masih jauh dari harapan, karena setiap kegiatan manusia selalu berhubungan dengan lingkungan hidup, tanpa disadari setiap aktivitas manusia menimbulkan gangguan pada lingkungan, seperti dalam rumah tangga setiap hari membuang sampah, kendaraan mengeluarkan polusi, pabrik membuang limbah, dan sebagainya. Hal tersebut telah mempengaruhi ekosistem lingkungan hidup. Untuk itu maka perlu adanya upaya baik dari aparaturnya itu sendiri maupun warga masyarakat agar mempunyai kepedulian terhadap SDA dan lingkungan.

Sesuai dengan aturan bahwa perusahaan diwajibkan memberikan laporan tentang pengelolaan dan pemantauan lingkungan per enam bulan sekali, tetapi kenyataannya yang melaporkan hanya ada 15 perusahaan yang menyampaikan laporan secara rutin. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dan kepedulian para pengusaha terhadap pengelolaan lingkungan masih perlu ditingkatkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang pegawai perusahaan menyatakan bahwa:

“kami selaku pihak swasta selalu ingin mentaati peraturan yang ada jangan sampai perusahaan kami ditutup gara-gara tidak mentaati peraturan, sebetulnya kami telah menyampaikan laporan tentang pengelolaan dan pemantauan lingkungan perusahaan ke Distrik perindustrian secara rutin setiap enam bulan sekali. Dan kami belum tahu bahwa sekarang harus disampaikan ke Distrik Kepulauan Ayau”.

Pernyataan tersebut, menjelaskan bahwa pihak swasta selalu ingin mentaati peraturan, tetapi disisi lain keberadaan Distrik itu sendiri sebagai Distrik yang baru belum diketahui oleh

pihak perusahaan. Untuk itu maka perlu upaya mensosialisasikan kembali tentang tugas-tugas dan fungsi Distrik Kepulauan Ayau, agar semua masyarakat mengetahui serta peduli akan perlunya pengelolaan lingkungan SDA dan lingkungan.

Dari data tersebut, menunjukkan bahwa tingkat kepedulian masyarakat terhadap SDA dan lingkungan masih perlu ditingkatkan. Dengan demikian upaya yang dilakukan sesuai dengan kebijakan Pemda Raja Ampat dalam bidang peningkatan fungsi lingkungan hidup, yang diarahkan guna mewujudkan dan memulihkan agar tetap terjaga keseimbangannya melalui pembinaan dan pengelolaan lingkungan hidup, penataan hukum kelembagaan pengelolaan SDA dan , pengendalian pencemaran serta pemulihan kualitas belum tercapai.

Responsibilitas

Responsibilitas Organisasi Distrik Kepulauan Ayau, dapat dilihat dari *pelaksanaan misi yang kelima* yaitu meningkatkan pembinaan setiap kegiatan usaha melalui integrasi lingkungan hidup, dengan tujuan menjadikan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. Adapun sasarannya adalah tercapainya penerapan pengelolaan lingkungan pada setiap kegiatan usaha. Untuk mencapai sasaran dan tujuan dibuat kebijakan memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang akrab lingkungan, dengan program pengembangan kegiatan ekonomi yang memanfaatkan SDA secara optimal dan ramah lingkungan. Adapun kegiatannya adalah mensosialisasikan teknologi ramah lingkungan kepada masyarakat.

Walaupun berbagai upaya telah dilaksanakan oleh Distrik Kepulauan Ayau untuk meningkatkan kesadaran para pengusaha / masyarakat, tetapi berdasarkan hasil pengamatan dan berdasarkan data yang ada masih terdapat penambang yang tidak mempunyai SIPD (liar). Hal tersebut juga dikatakan oleh seorang Kepala Distrik bahwa:

“Masalah yang krusial dihadapi oleh Distrik saat ini adalah masalah penggalian liar yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam menanganinya kami tidak bisa saklek dengan menutup usahanya, karena ada pertimbangan lain dalam mencari solusi. Kami menginginkan semua stakeholders terlibat dan ikut memikirkan jalan keluarnya agar kebijakan yang diambil dapat diterima oleh semua stakeholders”.

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan seorang Kepala Seksi, bahwa: “dalam menghadapi masalah penambang liar bagi kami jadi buah simalakama, karena para penambang liar umumnya mereka adalah masyarakat kecil dengan pendidikan mereka yang rendah dan lahan yang digarap relatif sedikit serta jenis usaha yang relatif kecil, tetapi

berdasarkan aturan mereka diharuskan memenuhi syarat-syarat untuk kegiatan usaha yang relatif banyak, yang otomatis memerlukan pemikiran dan biaya. Karena sesuai dengan aturan, para pengusaha dalam mengajukan SIPD disamping harus membuat AMDAL, UPL dan UKL, juga harus menyetorkan biaya reklamasi dalam bentuk Deposito untuk dijadikan jaminan, dan buku depositonya disimpan di Distrik Kepulauan Ayau, yang dapat diambil kembali apabila pengusaha/penambang telah melaksanakan eksploitasi dan reklamasi atas lahan bekas tambangnya”.

Dari pernyataan di atas, jelas bahwa para pengusaha / penambang belum mempunyai kesadaran untuk memiliki SIPD dalam melaksanakan penambangannya. Dan berdasarkan hasil pengamatan dan data yang ada di Distrik Kepulauan Ayau, bahwa jumlah pengusaha/penambang yang tidak memiliki SIPD sampai akhir Bulan Mei tahun 2010 sebanyak 27 pengusaha, dan yang mempunyai SIPD sebanyak 23 pengusaha. Selain itu, ditemukan pula perusahaan yang menggunakan air bawah tanah (ABT) yang tidak disertai dengan surat ijin pengambilan air (SIPA) bawah tanah. Dari 87 perusahaan pemakai ABT di Kabupaten Raja Ampat, ada 61 perusahaan yang tidak mempunyai SIPA bawah tanah serta tidak ada meteran airnya, sedangkan hanya 26 perusahaan pemakai ABT yang disertai dengan surat ijin.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi Distrik Kepulauan Ayau

Penelitian ini memfokuskan pada tiga variabel internal di dalam organisasi yang diduga kuat mempengaruhi kinerja organisasi Distrik Kepulauan Ayau, yakni struktur organisasi, sumber daya manusia, dan finansial, yang akan dibahas secara berurutan berikut ini.

Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan unsur yang sangat penting, karena struktur organisasi akan menjelaskan bagaimana kedudukan, tugas dan fungsi dialokasikan di dalam organisasi. Struktur organisasi ini dapat dilihat dari tingkat pendelegasian wewenang yang ada dalam organisasi, tingkat pemanfaatan pegawai yang sesuai dengan spesialisasi, dan tingkat pengendalian pegawai dalam pelaksanaan tugas, yang akan dicoba diuraikan secara berurutan.

Apabila Struktur organisasi dilihat dari tingkat pendelegasian wewenang yang ada dalam organisasi Distrik Kepulauan Ayau akan nampak ketika tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Distrik dibagi habis kepada pejabat-pejabat yang ada di dalam organisasi. Tugas dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Distrik Kepulauan Ayau, merupakan tugas dan kegiatan yang biasanya dilaksanakan oleh Bagian dan sebagian lagi merupakan tugas Bagian

Ekonomi sekretariat daerah sebelum keluarnya Perda Nomor 22 tahun 2000. Tugas yang biasa dilaksanakan oleh bagian menyangkut mengumpulkan bahan, mengolah data, mengkoor kegiatan dalam rangka penyusunan program perwujudan, pembinaan, penanggulangan lingkungan dan pencemaran termasuk AMDAL. Sedangkan sebagian tugas bagian ekonomi sebelum berubah menjadi bagian sosial ekonomi, yang dialihkan ke Distrik Kepulauan Ayau menyangkut perizinan pertambangan dan energi, serta air tanah.

Distrik Kepulauan Ayau dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dikaitkan dengan struktur organisasi yang dibentuk sebagaimana telah diuraikan di atas, jelaslah bahwa struktur organisasi Distrik Kepulauan Ayau yang ada sekarang dapat mempengaruhi terhadap kegiatan organisasi dalam pencapaian misi dan tujuan organisasi. Struktur organisasi sangat berpengaruh terhadap kinerja organisasai ketika melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Organisasi dengan struktur yang kaku dan birokratik akan menghambat tumbuhnya kreativitas pegawai. Selain itu pengambilan keputusan menjadi sangat lamban, dan komunikasi antar unit organisasi menjadi berkurang. Organisasi yang kaku dan terkotak-kotak seringkali menimbulkan pemborosan, karena sumber daya (SDM dan fasilitas) tidak dapat dipakai bersama-sama.

Begitupula dengan struktur organisasi yang mekanistik sulit berkembang untuk melakukan inovasi. Organisasi harus mampu menyesuaikan dengan setiap perubahan serta mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar, serta organisasi harus mampu mengenali kebutuhan masyarakatnya, sehingga pelayanan yang diberikan akan sesuai dengan tuntutan masyarakat.

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia dilihat dari tingkat pendidikan yang dimiliki pegawai, sebagaimana telah diuraikan dimuka bahwa Pegawai atau aparatur pada Distrik Kepulauan Ayau, yang melaksanakan tugas dan fungsi mengelola termasuk pertambangan dalam pencapaian tujuan dan misi organisasi, tergantung jumlah pegawai dan kualitas pegawai, yang dilihat dari tingkat pendidikan formal, sikap mental pegawai dan spesialisasi tertentu yang dimiliki.

Berdasarkan hasil pengamatan dan data yang ada menunjukkan bahwa dari 15 pegawai di Distrik Kepulauan Ayau, tidak ada satu orangpun yang berlatar belakang pendidikan formal dari pertambangan, dan elektro, padahal Distrik disamping mengelola juga mengelola pertambangan, sehingga diperlukan pegawai yang mempunyai kemampuan yang bersifat teknis pertambangan,

termasuk energi. Sementara itu dari pegawai yang ada, hanya ada dua orang yang berlatar belakang pendidikan formal dari sarjana lingkungan dan 1 orang yang berpendidikan dari geologi. Sementara pegawai yang lainnya berlatar belakang pendidikan yang bervariasi.

Untuk keberhasilan Distrik Pengelolaan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya diperlukan sumber daya manusia untuk mendukung kegiatan dalam upaya mengatasi permasalahan termasuk pertambangan. Dari sumber daya yang tersedia dalam organisasi, sumber daya manusia memegang peranan yang sentral dan paling menentukan. Tanpa sumber daya manusia yang handal, pengolahan, penggunaan dan pemanfaatan sumber-sumber lainnya akan menjadi tidak efektif, efisien dan produktif. Dalam keadaan yang demikian tidaklah mengherankan bahwa tujuan serta program organisasi yang telah ditetapkan dengan baik akan tetap sulit terwujud secara baik dan benar.

Finansial

Sebagaimana telah diuraikan dalam tinjauan pustaka, bahwa finansial merupakan salah satu sumber daya yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi publik. Adanya Finansial, dalam suatu organisasi, selain faktor SDM dan sarana fisik lainnya, dukungan anggaran memegang peranan penting dalam kegiatan organisasi. Tujuan yang telah dirumuskan dengan strategi dan program sebaik apapun harus diikuti dengan dukungan anggaran yang memadai. Finansial di dalam penelitian ini akan dilihat dari tingkat pengalokasian anggaran untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan tingkat ketersediaan anggaran biaya operasional untuk kegiatan pembinaan terhadap pegawai dan masyarakat, yang akan diuraikan secara berurutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para kepala seksi dan para kepala sub bagian, selama tahun 2011 mereka mengeluh karena tidak adanya biaya operasional untuk melakukan kegiatan ke lapangan, sebagaimana pendapat salah seorang kepala seksi:

“untuk melaksanakan pemantauan ke lapangan, kami sering terbentur oleh biaya, disatu sisi kami harus melaksanakan tugas yaitu melaksanakan pemantauan ke perusahaan-perusahaan penambangan, industri maupun ke lokasi lahan tambang yang jaraknya relatif jauh, tetapi disisi lain kami tidak diberi biaya operasional, adapun biaya perjalanan Distrik diberikan apabila ada surat tugas dari kepala Distrik. Untuk tahun 2010 alhamdulillah ada kebijakan dari Bupati yang memberikan biaya operasional, dengan biaya itu maka kepala Distrik memberikan kebijakan lagi dari dana Rp. 30.000.000,00 untuk satu tahun dibagi 12 bulan, dan tiap bulannya hanya

2.500.000,00 dibagi 30 pegawai termasuk kepala Distrik, dapat dibayangkan berapa yang kami terima untuk melaksanakan kegiatan. Jadi menurut kami mengenai anggaran ini sangat berpengaruh sekali dalam menunjang kegiatan Distrik”.

Dari pernyataan tersebut jelas bahwa faktor anggaran atau finansial berperan sekali dalam menunjang kegiatan Distrik, dengan demikian aspek finansial dapat dianalogikan sebagai aliran darah dalam tubuh manusia, maka aspek finansial merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan yang dapat mempengaruhi kinerja suatu organisasi.

Dalam masalah finansial ini berbeda pendapat dengan hasil wawancara dengan kepala Distrik, yang menyatakan bahwa:

“ sebetulnya yang saya rasakan, faktor finansial tidak terlalu berpengaruh terhadap kinerja organisasi, sebab tanpa biaya operasionalpun para pegawai masih dapat melaksanakan tugas, sebab pada tahun 2011 saja Distrik kami tidak diberi biaya operasional tetap saja kegiatan dapat berjalan, asal ada kemauan pasti mereka bisa melaksanakan tugas. Tetapi alangkah baiknya kalau ada biaya, tetapi menurut saya tidak terlalu signifikan pengaruhnya terhadap kinerja organisasi, yang kami rasakan adalah kurangnya kendaraan operasional untuk melaksanakan tugas ke lapangan karena kendaraan yang ada tidak mencukupi”.

Pernyataan tersebut jelas, bahwa menurut Kepala Distrik faktor finansial tidak terlalu signifikan berpengaruh terhadap kinerja organisasi, yang berpengaruh adalah kendaraan operasional. Dari kedua pernyataan tersebut terjadi perbedaan persepsi antara para kepala seksi dan para kepala sub bagain dengan kepala Distrik mengenai pengaruh finansial terhadap kinerja organisasi. Untuk itu kami melakukan wawancara dengan seorang Kepala Distrik, yang menyatakan sebagai berikut:

Berdasarkan pengamatan dan data yang ada, mengenai anggaran rutin yang ada kurang menunjang terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, tetapi kekurangan tersebut dapat dibantu oleh adanya anggaran pembangunan, dimana untuk tahun anggaran 2010 ada kebijakan dari Bupati yang menambah jumlah kegiatan serta menambah besarnya alokasi anggaran pembangunan serta adanya biaya operasional.

Keterkaitan antara Variabel Struktur Organisasi, Sumber Daya Manusia dan Finansial dengan Kinerja Distrik Kepulauan Ayau.

Untuk mengetahui keterkaitan antara variabel struktur organisasi, Sumber Daya Manusia dan Finansial dengan Kinerja Distrik Kepulauan Ayau, sebagaimana telah diuraikan dimuka,

dapatlah diinterpretasikan bahwa faktor struktur organisasi dapat mempengaruhi terhadap kinerja Distrik Pengelolaan Kabupaten Raja Ampat. Berkenaan dengan hal tersebut dari hasil wawancara dan observasi di dapat bahwa dari variabel struktur organisasi masih mengalami kelemahan, antara lain: struktur yang ada belum menampung seluruh tugas dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Distrik, sebagaimana telah dijelaskan di dalam struktur organisasi tidak nampak adanya Sub bagian maupun seksi yang khusus menangani masalah pertambangan maupun energi, selain itu jabatan fungsional yang ada belum terisi. Keadaan tersebut jelas dapat berpengaruh terhadap kinerja organisasi Distrik Kepulauan Ayau.

Apabila kita amati tingkat konsistensi kebijakan dan kegiatan Distrik dengan aspirasi masyarakat dihubungkan dengan struktur organisasi Distrik, dengan tidak adanya aparatur yang khusus menangani masalah pertambangan, jelas tidak ada orang yang bertanggungjawab secara langsung terhadap kegiatan tersebut. Hal tersebut berpengaruh terhadap tingkat pendelegasian wewenang. Dengan tidak adanya yang bertanggungjawab maka berpengaruh terhadap kemampuan meningkatkan prakarsa dan kepedulian aparatur dan masyarakat serta tingkat upaya rehabilitasi kerusakan SDA dan lingkungan.

Keadaan tersebut, ditambah dengan sumber daya manusia yang ada di Distrik Kepulauan Ayau, baik secara kuantitas maupun kualitas belum memadai. Selain itu apabila melihat latar belakang pendidikan jika dikaitkan dengan tugas yang harus dilaksanakan, dari 30 pegawai di Distrik Kepulauan Ayau, tidak ada satu orangpun yang berlatar belakang pendidikan formal dari pertambangan, dan elektro, padahal Distrik disamping mengelola juga mengelola pertambangan dan energi, sehingga diperlukan pegawai yang mempunyai kemampuan yang bersifat teknis pertambangan, termasuk energi.

Apabila sumber dana (finansial) dikaitkan dengan indikator akuntabilitas, responsibilitas dan responsivitas memperlihatkan bahwa untuk melaksanakan pembinaan, pemantauan dan monitoring terhadap kegiatan pengelolaan lingkungan dan pertambangan diperlukan sumber dana. Begitupula untuk melaksanakan reklamasi terhadap lahan bekas tambang diperlukan dana.

Masalah dana sebagai penunjang kegiatan di Distrik Kepulauan Ayau belum memadai. Hal tersebut terlihat masih adanya keluhan dari para pegawai untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada Bab IV, dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu penelitian ini menemukan bahwa Distrik Kepulauan Ayau Kabupaten Raja Ampat dari Hasil studi memperlihatkan bahwa kinerjanya belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek. *Pertama*, akuntabilitas yang memperlihatkan bahwa tingkat konsistensi kebijakan dan kegiatan dinas belum sesuai dengan aspirasi masyarakat, tingkat kemampuan meningkatkan prakarsa dan kepedulian aparatur dan masyarakat baru sebatas pencapaian target belum sampai pada outcome, tingkat rehabilitasi kerusakan sumber daya alam dan lingkungan belum dapat dilaksanakan. *Kedua*, responsibilitas yang memperlihatkan bahwa masih tingginya tingkat pelanggaran pengusaha termasuk penambang terhadap aturan, masih rendahnya tingkat kontribusi penerimaan dari pajak pertambangan dan air bawah tanah (ABT), belum sesuainya antara perumusan misi dan tujuan organisasi dengan dinamika perubahan. *Ketiga*, responsivitas memperlihatkan bahwa masih adanya keluhan dari masyarakat tentang pelayanan perijinan, dan belum optimalnya pembinaan terhadap kegiatan para pengusaha / penambang.

Kinerja Distrik Kepulauan Ayau Kabupaten Raja Ampat yang dilihat dari tiga indikator tersebut, dipengaruhi variabel internal organisasi, *Pertama*, variabel struktur organisasi, yakni struktur organisasi yang ada belum menampung seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan sehingga berpengaruh terhadap tingkat pendelegasian wewenang, belum sesuainya penempatan pegawai menurut spesialisasi yang diketahui dengan belum terisinya jabatan fungsional dan tingkat pendelegasian pegawai dalam pelaksanaan tugas yang diketahui dengan tidak adanya sub bagian yang menangani masalah pertambangan dan energi. *Kedua*, variabel sumber daya manusia, yakni kurangnya sumber daya manusia baik kuantitas maupun kualitas, tingkat pendidikan pegawai yang belum sesuai dengan tugas yang harus dilaksanakan yang diketahui dari belum adanya pegawai yang mempunyai latar belakang pendidikan dari pertambangan maupun elektro, serta kurangnya kemampuan teknis yang dimiliki pegawai. *Ketiga*, variabel finansial, yakni anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi belum memadai dan kecilnya biaya operasional untuk menunjang pencapaian misi dan tujuan organisasi. Ketiga variabel internal organisasi tersebut mempengaruhi kinerja Distrik Kepulauan Ayau Kabupaten Raja Ampat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ancok, Djamaluddin, 2001, *Manajemen Sumber daya manusia* (MAP 532)
- Amstrong, Michael, 1988. *Menjadi Manajer yang lebih baik lagi*, Binarupa Aksara, Jakarta
- Arikunto, Suharsimi, 1996, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta
- Bernadin, H. John & Joyce, E.A. Russell, *Human Resource Management*, Mc Grow-Hill, inc., Singapura, 1993
- Bryson, John M, (Penerjemah M. Miftahudin), 1999 *perencanaan Strategi Organisasi Sosial*, Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Dwiyanto, Agus, 1999, *Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik, Makalah Seminar Kinerja Organisasi Sektor Publik Kebijakan dan Persiapannya*, Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fisipol UGM, Yogyakarta.
- Effendi, Sofian, 2002, *Materi Kuliah Evaluasi dan Implementasi Kebijakan Publik*, MAP-UGM, Yogyakarta.
- Esman, Milton, J, 1989. *The Element of Institution Building*, Ithaca: Cornell University Press.
- Etzioni, Amitai, 1969. *Organisasi-Organisasi Modern*, terjemahan Suryatim, UI Press, Jakarta.
- Flippo, Edwin B, 1987. *Manajemen Personalia*, edisi keenam, Erlangga Jakarta.
- Gibson, Ivancevich dan Donnely, 1989. *organisasi dan Manajemn*, Erlangga Jakarta.
- Goggin, Malcolm L., et al, 1990. *Implementation Theory and Practice : Tward a third generation*, Glenview, Illinois, USA : Foresman and Company.
- Handayani, Soewarno, 1982. *Administrasi pemerintahan dalam Pembangunan Nasional*, PT. Gunung Agung, Jakarta.
- Hasibuan, Malayu SP, 1984. *manajemen dasar, Pengertian dan Masalah*, CV Haji Masagung, Jakarta.
- , 1996. *Organisasi dan Motivasi*, Bumi Aksara, Bandung.
- Henry, Nicholas, 1988. *Administrasi Negara, Masalah-masalah Kenegaraan*, Rajawali press, Jakarta.
- Higgins, J.M, 1970, *Organization Policy and Strategic Management*. Hinsdale, III, Dryden Press.
- Jackson, J.H, Morgan, CP, dan Paolillo, J, 1978. *Organization Theory, A Macro Perspective for management*, Prentice-Hall, U.S.A.
- Joedono, S.B, 1974, *Administrasi Pembangunan, sebuah pengantar*, Prisma No.4,4.
- Jones, Gareth R, 1991, *Organizational Theory: Text and Cases Addition* Wesley Publishing Company, A & M University, Texas.
- Kaho, Josef Riwu, 1988. *Prospek Otonomi daerah di Negara RI*, Rajawali Pers.
- Keban, T. Yeremias, 1994, *Pengantar Administrasi Publik*, Modul untuk Matrikulasi Administrasi publik, MAP- UGM, Yogyakarta.
- , 1995, *Kinerja Organisasi Publik*, Bahan seminar sehari dalam rangka purna tugas Drs. Sedyono, Fisipol- UGM, Yogyakarta.
- , 1998, *Cara Pengukuran Variabel Penelitian*, UGM Yogyakarta.
- Kleden, Ignas, 1987. *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*, LP3ES, Jakarta
- Mitchell, B. Bruce. Setiawan dan Rahmi, Dwita Hadi, 2000, *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*, Cetakan Pertama
- Moeleong, Lexy.J, 1995, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mardiasmo, 2001. *Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Makalah Seminar Otonomi Daerah, oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI)*, Batam.

- Notoatmodjo, Soekidjo, 1998. *Pengembangan Sumber daya Manusia* (Edisi Revisi), Rineka Cipta, Jakarta.
- Numberi, Freddy, 2000. *Organisasi dan Administrasi Pemerintah*, Bahan Seminar Nasional Profesionalisasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan Publik, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fisip UGM Yogyakarta.
- Randall B. Ripley, 1995, *Policy Analysis in Political Science*, Chicago, Nelson.
- Salusu, J, 1996. *Mpengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik Non Profit*, Pt. Grasindo, Yogyakarta.
- Siagian, Sondang P, 1985, *Analisa serta perumusan Kebijaksanaan dan Strategi Organisasi*, Gunung Agung, Jakarta
- Simamora, Henry, 1995. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, SKPN, Yogyakarta.
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian, 1995. *Methode Penelitian Survey*, Cetakan II, Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia,
- Sugiyono, 1992. *Methode Penelitian Administrasi*, Bandung : Alfabeta,
- Suradinata, Ermaya, 1996. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, CV. Ramadhan Bandung.
- Soerjadi, FX, 1993. *Organization and Methods*, PT.Midas Surya Grafindo, Jakarta.
- Steers, Richard,M, 1980. *Efektivitas Organisasi*, Erlangga, Jakarta.
- Thoha, Miftah, 2001. *Prilaku Organisasi Konsep dasar dan Aplikasinya*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tjokrowinoto, Moeljarto, 1996."Pembangunan : Dilema dan Tantangan", Yogyakarta, Pustaka Pelajar,
- Utomo, Warsito, 1999, *Kumpulan Makalah Otonomi Daerah* yang di sampaikan pada beberapa Seminar, Yogyakarta.
- Zainum, Buchari, 1989. *Manajemen dan Motivasi*, Edisi Revisi, , Balai Aksara.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang *Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup*
- Undang-Undang Otonomi Daerah 1999 (*UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 25 Tahun 1999 dan UU No. 28 Tahun 1999*), Bandung : Kuraiko Pratama.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang *Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004*, Sinar Grafika, Jakarta
- Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*
- Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang *AnPedoman Organisasi Perangkat Daerah*
- Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 22 tahun 2000 tentang *Apembentukan dan susunan organisasi dinas daerah Kabupaten Raja Ampat*
- Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, Kerja sama Badan Pusat Statistik dan Bappeda, *Raja Ampat Dalam Angka Tahun 2012*.
- Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, Bappeda, *Renstra Tahun 2012*.
- Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor 503.05/kep.167-DPLH/2001 tentang *PelTim Koordinasi proses Penertiban Surat Ijin / Rekomendasi di*